



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2020

**Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2020 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ini merupakan perwujudan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup dan Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang berisikan capaian indikator kinerja program, capaian indikator kinerja kegiatan, dan realisasi anggaran pada tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan  
Hubungan Masyarakat,



Hendarman  
NIP 196106301986031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>7</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Gambaran Umum.....</b>	<b>7</b>
<b>B. Dasar Hukum.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS.....</b>	<b>12</b>
<b>B. RENCANA KINERJA .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>14</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ..	11
Gambar 3. Laman Facebook Kemendikbud.....	25
Gambar 4. Laman Tweeter Kemdibud.....	26
Gambar 5. Laman Instagram Kemendikbud.....	27
Gambar 6. Laman Youtube Kemendikbud.....	27
Gambar 7. Laman Perpustakaan Kemendikbud.....	29
Gambar 8. Perpustakaan Kemendikbud.....	31
Gambar 9. Petugas Layanan Terpadu secara Daring.....	36
Gambar 10. Total Nilai Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat...	39
Gambar 11. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat per Desember 2020 .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	12
Tabel 2. IKK Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral.....	15
Tabel 3. IKK Jumlah Penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan.	16
Tabel 4. IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan .....	18
Tabel 5. IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi.....	25
Tabel 6. IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud .....	30
Tabel 7. IKK Jumlah failitasi informasi melalui Lembaga negara,.....	33
Tabel 8. IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan public.....	35
Tabel 9. IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB.....	38
<b>Tabel 10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 .....</b>	<b>40</b>
Tabel 11. Rincian Realisasi Anggaran per Komponen .....	41

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang secara struktural dan administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbud yang bertugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan kerja sama, koordinasi perizinan satuan pendidikan asing, dan koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, sekolah Indonesia di luar negeri, fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization serta pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat serta urusan ketatausahaan Biro. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, untuk mencapai visi dan misi Kemendikbud yang tertuang dalam rencana strategis 2020-2024, capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu ditargetkan sebesar 84 realisasinya sebesar 85.

Dari indikator kinerja program tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki kegiatan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara, berdasarkan kegiatan tersebut, capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditargetkan sebesar 70 % realisasinya sebesar 80%
- b. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media yang ditargetkan sebesar 80% realisasinya 82%

- c. Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri ditargetkan sebesar 70% realisasinya 70%
- d. Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud ditargetkan sebesar 750 koleksi realisasinya 4090 koleksi
- e. Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat yang ditargetkan 179 Dokumen realisasinya 74 Dokumen
- f. Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik yang ditargetkan 82 % realisasinya 85 %
- g. Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB yang ditargetkan BB realisasinya 100%
- h. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 yang ditargetkan nilai 86 realisasinya 94.34.

Pada tahun 2020 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 53.180.587.000,-. dengan realisasi anggaran berdasarkan surat perintah pencairan dana sebesar Rp 51.914.714.960,- atau sebesar 97,62%. Berdasarkan capaian indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan realisasi anggaran tersebut, menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut telah mencapai target dan beberapa telah melampaui target.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang secara struktural dan administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbud yang bertugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan kerja sama, koordinasi perizinan satuan pendidikan asing, dan koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization*, sekolah Indonesia di luar negeri, fasilitasi dan administrasi kegiatan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* serta pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat serta urusan ketatausahaan Biro.

Sebagai bagian integral dari Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sepenuhnya mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran strategisnya dalam *“pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian”*.

Berbagai upaya penerapan pelaksanaan kebijakan, khususnya pada peningkatan pelayanan prima di bidang informasi dan humas secara umum telah menunjukkan banyak kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan dalam pelayanan informasi publik. Meskipun demikian, hingga saat ini peningkatan tersebut masih perlu dioptimalkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.

## **B. Dasar Hukum**

Sebagai acuan penulisan LAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2020, berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permendikbud nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;
8. Permenpan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 143 orang yang terdiri 1 orang Kepala Biro, 1 orang Kasubag TU; 121 orang staf, dan 20 orang PPNPN.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional Pranata Humas, serta jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok:

**Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan kerja sama, koordinasi perizinan satuan pendidikan asing, dan koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization*, sekolah Indonesia di luar negeri, fasilitasi dan administrasi kegiatan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* serta pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat serta urusan ketatausahaan Biro.**

Temukan di Google Play  
<http://bit.ly/majalahjendela>

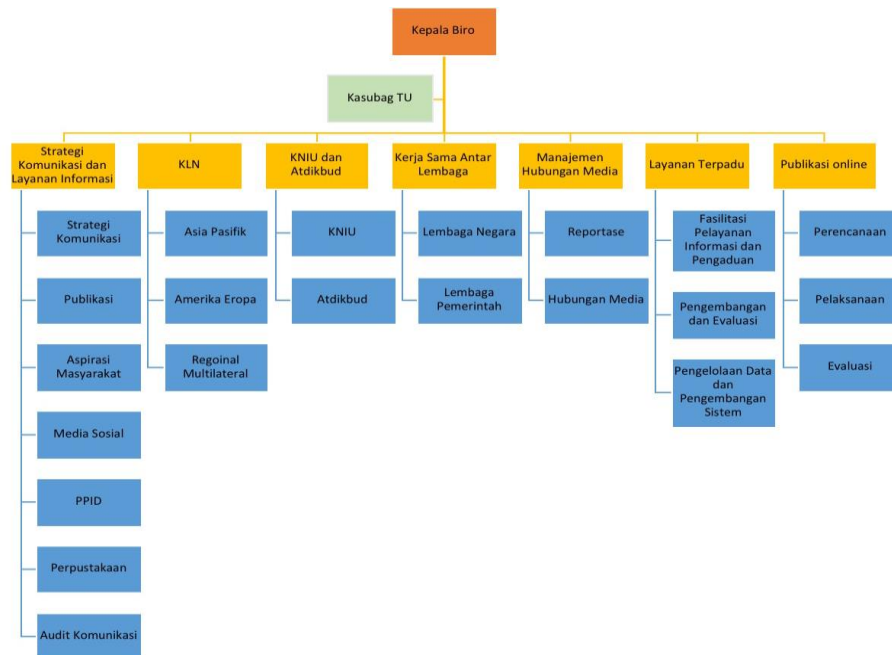
JUARA KETIGA IKMA 2018  
KATEGORI  
GOVERNMENT INSTITUTION  
ICMA 2018  
PENGALAMAN CONTENT MARKETING AWARDS

kemdikbud.go.id | KEMENDIKBUD RI | jendela.kemdikbud.go.id

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah:

1. Pembinaan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Koordinasi perizinan satuan pendidikan asing;
4. Koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations*, *The Southeast Asian Ministers of Education Organization*, dan sekolah Indonesia di luar negeri;
5. Fasilitasi dan administrasi kegiatan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations*;
6. Pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga;
7. Koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat;
8. Pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
9. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media;
10. Pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
13. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Dalam melaksanakan tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dibentuk kelompok Koordinator dan pokja dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

#### D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama

Permasalahan dan kendala di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dijelaskan sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran untuk melakukan publikasi melalui sosialisasi program Kemendikbud;
2. Adanya Covid-19 menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan ULT dan perpustakaan secara langsung;
3. Pandemi Covid-19 menyebabkan program Darmasiswa tidak dapat dilakukan;
4. Pertemuan, forum, dan layanan tamu asing dalam rangka kerja sama luar negeri tidak dapat dilaksanakan atau ditunda.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana, pembina, penyelenggara kerja sama, koordinasi perizinan satuan pendidikan asing, dan koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, *The Southeast Asian Ministers of Education Organization*, sekolah Indonesia di luar negeri, fasilitasi dan administrasi kegiatan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* serta pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat serta urusan ketatausahaan Biro.

#### B. RENCANA KINERJA

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, maka penetapan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Target 2024
Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	84	85
<b>Kegiatan</b>	<b>Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara</b>		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Target 2024
Tersedianya	Persentase tindak lanjut kerja sama	70%	90%

layanan prima dalam kerja sama	bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan		
	Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	0	850
	Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	70%	90%
Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	80%	88%
	Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	750	950
	Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat	179	179
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	82%	86%
Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	BB	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86	86	94

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2020 memiliki empat sasaran kegiatan yaitu Tersedianya layanan prima dalam kerja sama; Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga; Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat; dan Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

##### **1. Tersedianya layanan prima dalam kerja sama**

Sasaran kegiatan Tersedianya layanan prima dalam kerja sama didukung oleh tiga indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut

###### **a. Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan**

Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbud, mulai dari perjanjian internasional (MoU) yang sifatnya bilateral sampai dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam organisasi Internasional (ASEAN, SEAMEO, G20, dsb).

Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan diukur melalui jumlah program yang dilaksanakan secara efektif yaitu kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan

kebudayaan yang telah diimplementasikan dibandingkan dengan Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada oleh unit utama dan satker terkait di lingkungan Kemendikbud.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menetapkan target untuk indikator kinerja kegiatan Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar 70%.

Saat ini jumlah kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diimplementasikan sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 77 kesepakatan, sedangkan dengan Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada oleh unit utama dan satker terkait di lingkungan Kemendikbud adalah sebanyak 110 kesepakatan. Sehingga tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan adalah 70%.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan.

**Tabel 2. IKK Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target IKK 2020 (%)</b>	<b>Target IKK 2024 (%)</b>	<b>Capaian IKK (%)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan</b>				
	70	90	70	100

Pada tahun 2020 ini terdapat kendala yaitu forum/pertemuan kerja sama luar negeri yang dibatalkan dan ditunda. Selain itu kendala yang

lain adalah kurang cepatnya respon negara mitra terhadap draf naskah perjanjian kerja sama.

Strategi yang dilakukan diantaranya Melakukan koordinasi internal Kemendikbud Ristek dan K/L terkait dalam penyusunan naskah perjanjian kerja sama luar negeri Melakukan Koordinasi erat dengan Atdikbud, KBRI di negara mitra, Kedubes di Jakarta

Pencapaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut Kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan dicapai melalui output Layanan Kerjasama Internasional dan sub output Layanan Kerjasama Bilateral, Multilateral, Regional, dengan total alokasi anggaran Rp 5.756.680.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 5.600.428.955,- atau 97,29%.

**b. Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan.**

Penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan pada IKK ini adalah penerima beasiswa darmasiswa. Beasiswa Darmasiswa merupakan beasiswa *non-degree* yang diberikan kepada pelajar asing untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia selama 10-12 bulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak tahun 1974 dengan peserta berasal dari 185 negara berpartisipasi.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan.

**Tabel 3. IKK Jumlah Penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2020 (orang)	Target IKK 2024 (orang)	Capaian IKK (orang)	Realisasi Fisik (%)
<b>Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan</b>				
	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pada IKK penerima jumlah beasiswa bidang Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat tercapai karena adanya pademik COVID-19 yang menyebabkan terjadinya *lockdown* di Indonesia. Pencapaian indikator kinerja Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan dicapai melalui output Beasiswa Darmasiswa RI dengan total alokasi anggaran Rp 184.513.000,- terealisasi sebesar Rp 154.795.190,- atau 83,89%.

Sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19 Pada tahun 2020, penerimaan beasiswa ditiadakan. Tetapi dilaksanakan pemulangan terhadap 7 orang penerima beasiswa darmasiswa.

**c. Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri.**

Keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri merupakan penyediaan layanan yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi program kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja diukur dari ketepatan program, kebermanfaatan program, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri.

**Tabel 4. IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target IKK 2020 (%)</b>	<b>Target IKK 2024 (%)</b>	<b>Capaian IKK (%)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri</b>				
	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>76,51</b>	<b>109,30</b>

IKK ini merupakan penggabungan kinerja program kerja sama di Komisi Nasional Indonesian untuk UNESCO dan program pada satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada perwakilan RI di luar negeri.

1) Program Komisi Nasional Indonesian untuk UNESCO (KNIU)

Pada tahun 2020, presentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO sebesar 70%. Dalam mencapai kinerja tersebut, Sekretariat KNIU telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Bidang Pendidikan

- Terlibat aktif dalam program *Lifelong Learning* (Literacy, TVET). Dalam rangka menjadi inovatif dan inklusif, proses pembelajaran dan strategi pendidikan harus mengakui semua tempat di mana pembelajaran berlangsung, maka UNESCO mengembangkan program *Lifelong Learning* atau Pembelajaran Sepanjang Hayat yang berupaya untuk memungkinkan semua orang di seluruh dunia untuk dapat memanfaatkan potensi besar TIK untuk pembelajaran dan pemberdayaan diri. *Standard setting* UNESCO tentang *lifelong learning* telah diadaptasi dan

menginspirasi berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia antara lain Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, program Pendidikan Anak Usia Dini, Kurikulum 2013, Gerakan Literasi Nasional, dan Penguatan Pendidikan Karakter yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

- Indonesia mulai aktif sebagai anggota Jaringan Proyek Sekolah Berasosiasi dengan UNESCO (UNESCO ASPnet) sejak tahun 2000. Tujuan utama ASPnet adalah untuk membangun budaya damai pada tingkat sekolah dan komunitasnya, pada tingkat nasional dan internasional, melalui kegiatan yang dilakukan bersama oleh siswa, dipandu oleh guru dan orang tua murid. Manfaat bagi sekolah yang menjadi anggota ASPnet antara lain: Akses pada pendidikan global; meningkatkan kualitas pendidikan; akses pada informasi dan teknologi; dan akses pada pembelajaran kolaborasi. Lewat akses ini, sekolah dapat mengembangkan dan memakai metode belajar yang baru dan diseminasi metode tersebut. Jaringan antar anggota UNESCO ASPnet di Indonesia dilakukan melalui *mailing list*. Sedangkan untuk jaringan keanggotaan UNESCO ASPnet Internasional dilakukan melalui: Schoolnet dan Mondialogo yang didukung oleh UNESCO dan melalui iEARN (*International Education and Resource Network*) yang didukung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan melalui *Face to Faith* yang didukung oleh Tony Blair *Foundation*. Pada tahun 2020, ASPNet aktif melakukan sosialisasi program iEARN dan Arigatou International.
- *Joint Project Among National Commissions for UNESCO*. Pada awal Juli 2020, KNIU menerima tawaran untuk melakukan joint project among national commissions for UNESCO di regional Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia pada *project* tersebut, KNIU secara aktif bersama sama dengan tim peneliti dari Puslitjak, Kemendikbud

melakukan penelitian dan penelaahan penyusunan preliminary survey report untuk Joint Project tersebut. KNIU telah memberikan Final Survey Report dan beberapa dokumen kelengkapan lainnya.

- Perayaan Hari Guru Sedunia. UNESCO melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) bekerja sama dengan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar peringatan Hari Guru Sedunia pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan tema “Guru: Memimpin dalam krisis, menata masa depan pendidikan di Indonesia” dan dihadiri oleh lebih dari 5000 peserta dari dinas pendidikan, guru, dan pengamat pendidikan.

b) Bidang Ilmu Pengetahuan

- Kerja Sama Program internasional L'Oréal-UNESCO *For Women in Science* antara L'Oreal Indonesia, KNIU dan Kemenristek/BRIN. Bentuk kerja samanya adalah penghargaan internasional L'Oréal-UNESCO *For Women in Science* yang telah berjalan sejak tahun 1998 dan diselenggarakan setiap tahun. Para peneliti perempuan yang luar biasa diberikan penghargaan atas kontribusi penting mereka bagi kemajuan sains, baik dalam ilmu kehidupan atau di bidang ilmu fisika, matematika, dan ilmu komputer. Sejak tahun 2004 program ini dijalankan di Indonesia atas kerja sama yang didukung oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemendikbud dengan tujuan untuk mengakui, menyemangati dan mendukung perempuan di bidang sains. Pada tahun 2020, program ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.
- *State of Conservation (SoC) of the World Héritage property "Komodo National Park"*. Dalam kaitan SoC tentang Pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo, KNIU berfungsinya mengawal bahwa jika ada pembangunan dan pengembangan kawasan Warisan Dunia UNESCO yang akan

dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip awal perlindungan dan pelestarian, sejalan dengan Konvensi 1972 UNESCO yang telah diratifikasi Indonesia “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”.

- Pada November 2020, Indonesia mengusulkan 2 Geopark Indonesia yaitu Geopark Ijen dan Geopark Maros untuk menjadi AUGGp (Aspiring UNESCO Global Geopark).

c) Bidang Kebudayaan

- KNIU memfasilitasi dalam perlindungan warisan budaya Indonesia yang telah menjadi Warisan Budaya Dunia, dan bermanfaat dengan adanya penguatan citra merek (*brand image*) dari produk budaya yang diharapkan berimbas pada: meningkatnya potensi penjualan produk dan layanan budaya; meningkatnya wisata ke daerah produsen dan layanan jasa terkait produk budaya; perlindungan terhadap pengakuan dari negara lain (terkait identitas nasional dan jati diri bangsa); meningkatnya kesatuan bangsa; dan menguatnya pengembangan pendidikan yang mendukung industri kreatif berbasis budaya (SMK pendalangan, dst); akses ke sumber pendanaan internasional; dan akses ke berbagai informasi terkait pengetahuan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya dalam melaksanakan cagar warisan budaya benda dan takbenda tradisional Indonesia.
- KNIU memfasilitasi tindak lanjut nominasi "Gamelan" ke dalam Warisan Budaya Takbenda serta tindak Lanjut Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin-Sawahlunto sebagai Warisan Dunia pada tanggal 27 Oktober 2020, serta penyusunan Policy Brief Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia sebagai tindak lanjut terhadap penetapan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia oleh UNESCO pada tanggal 31 Oktober 2019.

- Memberikan Tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Proyek Pembangunan pada Kompleks Candi Borobudur namun belum melampirkan bukti *Heritage Impact Assessment* (HIA) atau *Expert* Pelaksana HIA. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa Nilai Universal yang Luar Biasa dari properti itu dipertimbangkan dengan cermat dan dijaga sepenuhnya, juga akan mengikuti saran dan guidelines yang diberikan WHC dengan merencanakan penyusunan *Heritage Impact Assessment* (HIA) sebelum proyek pembangunan dapat dilaksanakan.
- Memfasilitasi pembuatan Laporan Keadaan Pelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana yang akan dikirimkan pada sekretariat WHC.

d) Bidang Komunikasi dan Informasi

Dalam rangka peningkatan kerja sama serta pembaruan informasi mengenai program *Memory of the World* (MoW) UNESCO, KNIU mengadakan pertemuan pada bulan November 2020 guna membahas *action plan* yang digunakan dalam mengimplementasikan program MoW.

2) Program Kerja Sama pada Satuan Kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri

Saat ini satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) pada perwakilan RI di luar negeri sejumlah 19 (sembilan belas). Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) satker yang tidak aktif yaitu Atdikbud Seoul dan Moskow, hal tersebut disebabkan karena belum adanya Atdikbud dan pemilihan Atdikbud Seoul dan Moskow ditetapkan pada akhir tahun 2020. Secara rata-rata presentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama

pada satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri sebesar 83,03%.

Adapun program yang telah kerja sama dan layanan yang sudah dilakukan oleh Atdikbud antara lain:

- a) Layanan Pendidikan melalui Sekolah Indonesia di Luar Negeri oleh beberapa Atdikbud;
- b) Program Pembinaan Masyarakat Indonesia Khususnya Para Pelajar;
- c) Layanan Dukungan Pengembangan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA);
- d) Pengembangan Rumah Budaya Indonesia; serta
- e) Berbagai program dalam mendukung program Kemendikbud

Kendala dalam Pencapaian indikator kinerja persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri diantaranya :

- a) Dengan adanya covid-19 membuat Koordinasi menjadi terbatas karena tidak dapat dilakukan secara luring
- b) Perubahan kebijakan pemerintah negara setempat yang cenderung berubah di masa pandemi sesuai dengan kondisi penyebaran Covid19.
- c) keterlambatan komunikasi informasi lintas Experts dan focal points terkait Program Geopark

Strategi yang dilakukan diantaranya adalah:

- a) koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara luring dilakukan secara daring
- b) Menyediakan sarana prasarana untuk menunjang koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara daring
- c) Penyelenggaraan Pertemuan Rutin bulanan Experts dan focal points Geopark Indonesia

Adapun secara rinci capaian kinerja dari masing-masing Atdikbud sebagaimana terlampir.

Pencapaian indikator kinerja persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri dicapai melalui output Layanan Kerjasama Internasional dan sub output sebagai berikut :

- a. Peningkatan Jaringan Kerjasama UNESCO dengan total alokasi anggaran Rp 843.054.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 780.292.730,- atau 92,56%
- b. Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud dengan total alokasi anggaran Rp 233.224.658.000, - tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 210.837.541.351,- atau 90,40%

## **2. Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga**

Sasaran kerja Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga didukung oleh indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media**

Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media merupakan penyediaan layanan informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas.

metode yang digunakan melalui dua survey, yaitu: 1) survey kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey*-SSS) dilaksanakan setahun sekali; dan 2) evaluasi media sosial dan media daring (laman) kemendikbud.

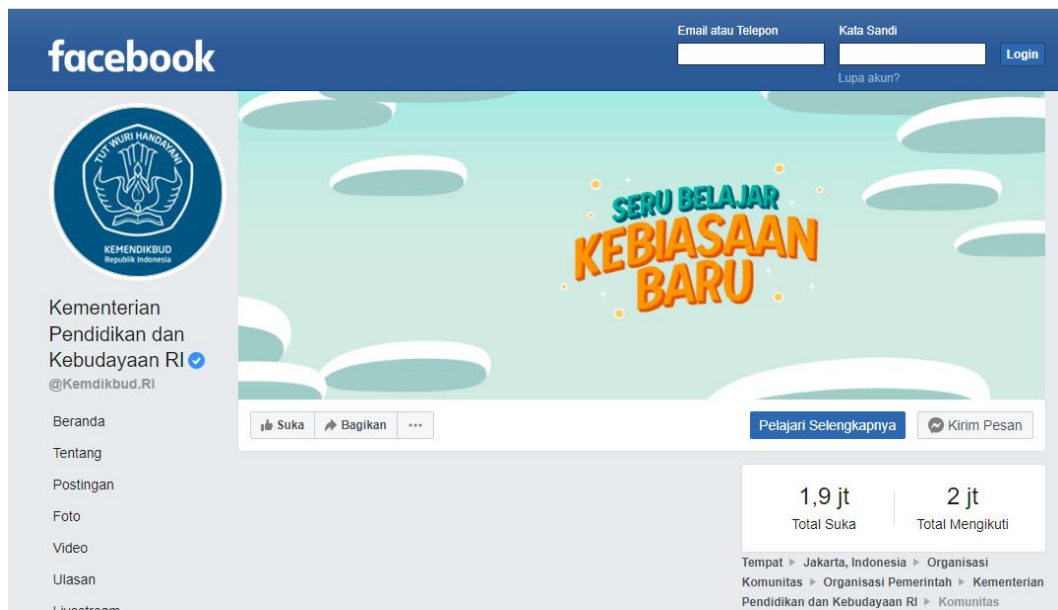
Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media.

**Tabel 5. IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2020 (%)	Target IKK 2024 (%)	Capaian IKK (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media</b>				
	80	88	92,4	115,5

Peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media sejumlah 92.4%. sebanyak 16,3% merasa agak terpenuhi akses dan kualitas informasi dan publikasi, 68,4 % merasa terpenuhi, dan 7,7 % merasa sangat terpenuhi.

Evaluasi media sosial dan media daring (laman) kemendibud dilakukan dengan mengukur jumlah penyuka dan pengikut pada media sosial yaitu facebook, twitter, Instagram, dan youtube.



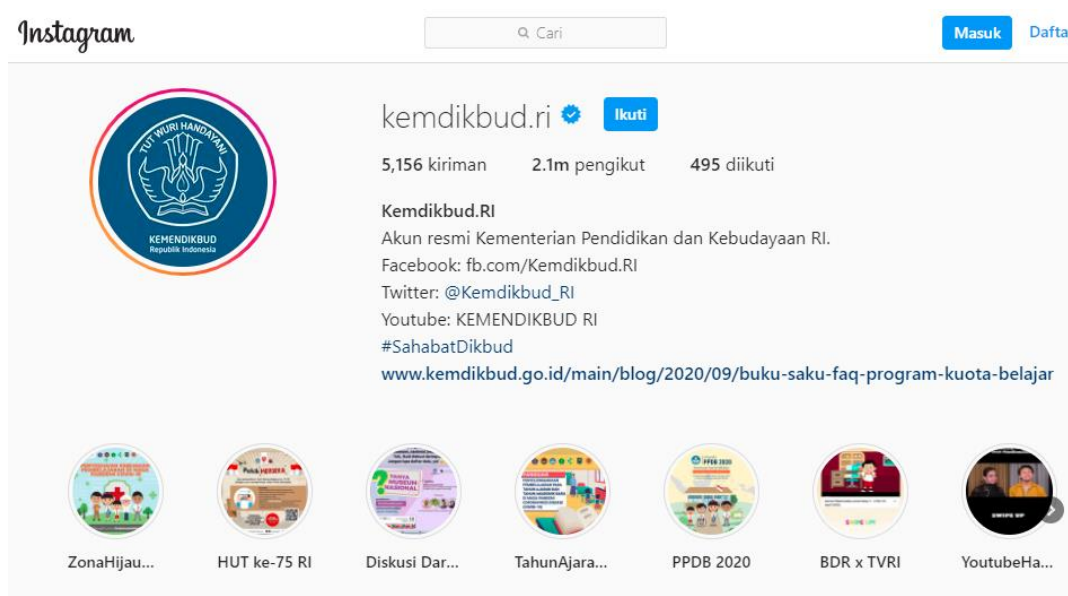
**Gambar 2. Laman Facebook Kemendikbud**

Pada media sosial Facebook, Kemendikbud memiliki jumlah pengikut sebanyak 2.004.564 pengikut dan jumlah penyuka sebanyak 1.971.576 penyuka.



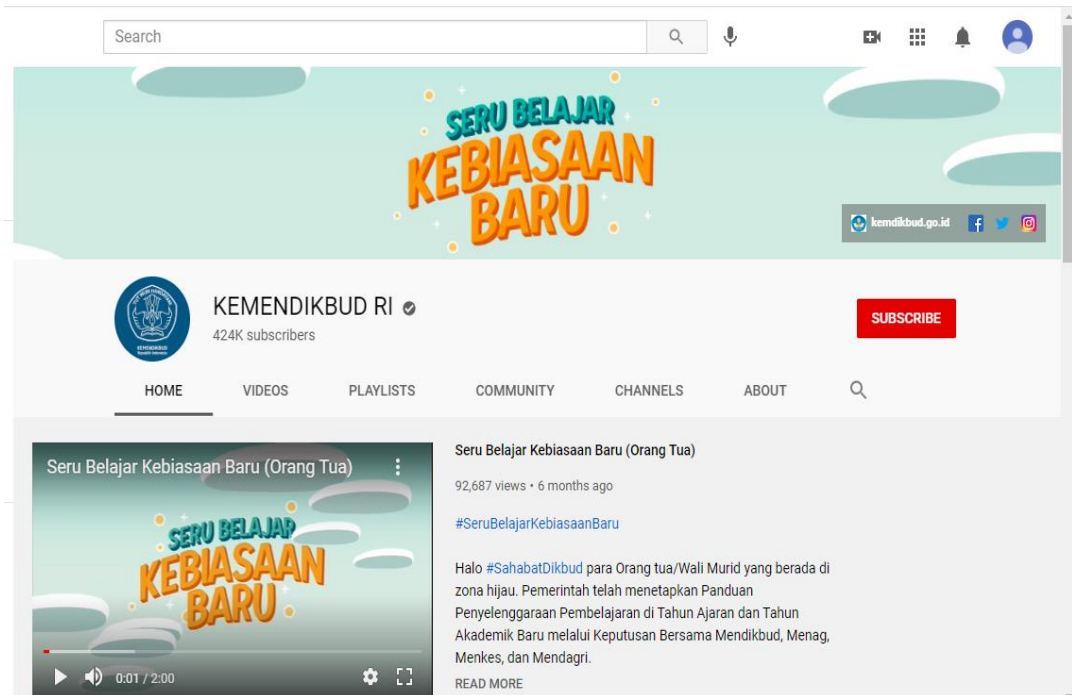
**Gambar 3. Laman Tweeter Kemdibud**

Pada media sosial twitter, Kemendikbud memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,8 juta pengikut.



#### Gambar 4. Laman Instagram Kemendikbud

Pada media sosial Instagram, Kemendikbud memiliki jumlah pengikut terbanyak pertama jika dibandingkan dengan K/L lainnya dengan jumlah pengikut sebanyak 2,1 juta pengikut.



#### Gambar 5. Laman Youtube Kemendikbud

Pada media sosial Youtube, Kemendikbud memiliki jumlah pelanggan sebanyak 424.000 pelanggan.

Kendala dalam pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media diantaranya :

- 1) Kurangnya koordinasi dengan unit utama Kemdikbud dalam mengundang tim penulis untuk meliput maupun terlambat memberikan bahan siaran pers sehingga informasinya tidak aktual.
- 2) Pemberitaan yang keluar terkait Pendidikan dan Kebudayaan sering kali tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan.
- 3) Pandemi Covid-19 membatasi pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara tatap muka

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media diantaranya :

- 1) Meningkatkan komunikasi dua arah dengan unit utama terkait baik melalui rapat maupun melalui saluran komunikasi
- 2) Melakukan pemantauan pemberitaan media massa. Jika terdapat media massa yang melakukan pemberitaan tidak sesuai maka dilakukan klarifikasi kepada media terkait
- 3) Melakukan kegiatan secara daring

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media dicapai melalui Sub Output:

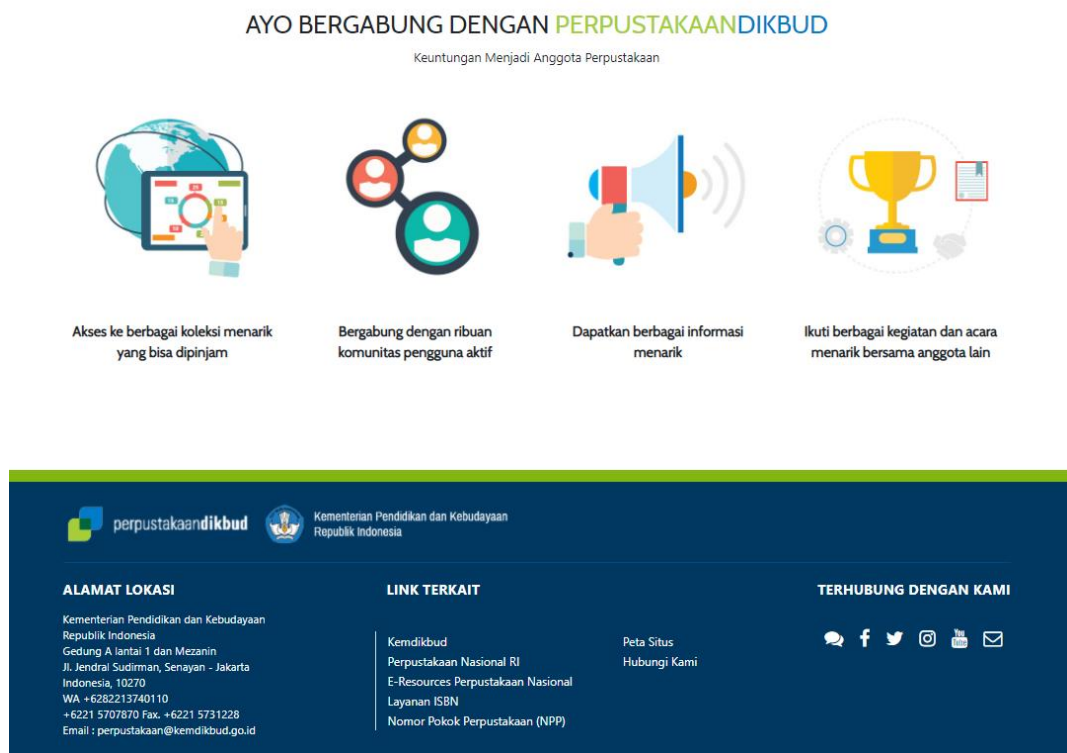
- 1) Publikasi Melalui Media TV, Radio, dan Cetak dari total alokasi anggaran sebesar Rp 15.025.368.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 14.998.289.482,- atau 99,82%
- 2) Publikasi Melalui Media Sosial dari total alokasi anggaran sebesar Rp 2.230.608.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 2.228.348.066,- atau 99,9%
- 3) Publikasi Melalui Media Portal Kemdikbud dari total alokasi anggaran sebesar Rp 378.470.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 377.459.200,- atau 99,73%
- 4) Layanan Informasi Pemangku Kepentingan dari total alokasi anggaran sebesar Rp 2.892.763.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 2.876.638.750,- atau 99,44%
- 5) Layanan Media dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.044.745.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.009.780.450,- atau 96,65 %
- 6) Penyediaan Informasi dan Dokumentasi dari total alokasi anggaran sebesar Rp 883.354.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 873.147.000,- atau 98,84 %

7) Layanan Aspirasi Masyarakat dari total alokasi anggaran sebesar Rp 857.383.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 851.537.500,- atau 99,32%

**b. Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud**

Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan Kemendikbud berupa karya cetak, karya rekam, karya digital, dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual. Penyimpanan karya cetak dan karya rekam melalui repositori, dan koleksi cetak/online.

Ketercapaian jumlah Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud di dukung oleh suboutput layanan perpustakaan kemendikbud dengan target ditahun 2020 sebesar 750 koleksi.



**Gambar 6. Laman Perpustakaan Kemendikbud**

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Ketercapaian Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud.

**Tabel 6. IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target IKK 2020 (koleksi)</b>	<b>Target IKK 2024 (koleksi)</b>	<b>Capaian IKK (koleksi)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud</b>				
	<b>750</b>	<b>950</b>	<b>4090</b>	<b>517,72</b>

Setiap unit kerja dilingkungan kemendikbud memiliki karya cetak dan karya rekam (kurikulum, juklak/junknis BOS, panduan literasi dan lain lain) yang di produksi tiap tahunnya, jumlah karya cetak dan karya rekam (KCKR) dari unit kerja kemendikbud yang dihimpun di perpustakaan pada tahun 2020 sebesar 4090 koleksi dengan persentase sebesar 517,72%, yang terdiri dari karya cetak sebanyak 506 koleksi, karya rekam sebanyak 10 koleksi, karya digital sebanyak 2.648 dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual sebanyak 926 koleksi.

Kendala ketercapaian Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud diantaranya :

- 1) Dengan adanya pandemic covid-19 maka layanan perpustakaan tidak dapat dilakukan dengan daring secara langsung ke perpustakaan
- 2) Dengan adanya pandemi covid 19 maka membatasi pertemuan langsung untuk promosi layanan perpustakaan

Strategi yang dilakukan yaitu :

- 1) Menggunakan <http://repositori.kemdikbud.go.id> untuk melayani pemustaka
- 2) Mengoptimalkan website <https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/> dalam sosialisasi perpustakaan



**Gambar 7. Perpustakaan Kemendikbud**

Pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud di capai melalui sub output Layanan Perpustakaan Kemdikbud dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.776.492.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.732.739.126,- atau 97,54%.

**c. Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat**

Fasilitasi informasi adalah fasilitasi yang diberikan berupa koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Kemendikbud baik itu internal (Kemdikbud) maupun eksternal (lembaga masyarakat, media massa, serta lembaga negara dan pemerintahan).

Fasilitasi kerja sama dalam negeri adalah fasilitasi yang diberikan untuk mengembangkan kerja sama di dalam negeri baik itu dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat (LSM, Yayasan/Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan lainnya)

Lembaga legislatif adalah lembaga yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR, DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga negara adalah Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dibawah Presiden

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pemeritahan di bawah Gubernur/Bupati/Walikota

Metode yang digunakan melalui perhitungan jumlah surat permohonan fasilitasi informasi dan kerjasama, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hubungan lembaga legislatif, hubungan lembaga negara, lembaga masyarakat dan media massa.

Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama (dalam negeri) melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat oleh suboutput layanan hubungan antarlembaga negara dan layanan Lembaga masyarakat dengan target ditahun 2020 sebesar 179 laporan.



Berikut tingkat ketercapaian Jumlah Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat.

**Tabel 7. IKK Jumlah failitasi informasi melalui Lembaga negara, media dan Lembaga masyarakat**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target IKK 2020 (Laporan)</b>	<b>Target IKK 2024 (Laporan)</b>	<b>Capaian IKK (Laporan)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat</b>				
	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>74</b>	<b>41,3</b>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 indikator kinerja kegiatan jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat telah terealisasi sebesar 74 laporan dengan persentase sebesar 41,3%. Fasilitasi jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama dilakukan melalui Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud dengan Pemerintah dan Lembaga Daerah, dan masyarakat sebanyak 32 laporan, pendampingan kunjungan kerja Lembaga Tinggi Negara sebanyak 10 laporan, rapat kerja bersama Lembaga Tinggi Negara sebanyak 32 laporan.

Kendala ketercapaian Jumlah Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat yaitu :

- 1) Adanya Situasi pandemi COVID 19 mengakibatkan terbatasnya pertemuan secara langsung
- 2) Adanya Situasi pandemi COVID 19 sehingga membatasi kunjungan dari pemerintah daerah dan Lembaga masyarakat

Strategi ketercapaian Jumlah Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat yaitu melakukan pertemuan secara daring dengan pemerintah daerah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini di capai melalui Kegiatan :

- 1) Layanan Hubungan Antar Lembaga Negara dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.535.023.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.522.259.920,- atau 99,17%

2) Layanan Hubungan Antar Lembaga Masyarakat dari total alokasi anggaran sebesar Rp 606.784.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 581.465.800,- atau 95,83%

### **3. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat**

Sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan layanan masyarakat didukung oleh indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik**

Indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik diukur melalui dari 6 aspek, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik)

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada

masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik

Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik didukung oleh Output Layanan Terpadu Kemendikbud dengan target ditahun 2020 sebesar 82%.

Berikut tingkat ketercapaian Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik.

**Tabel 8. IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan public**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2020 (%)	Target IKK 2024 (%)	Capaian IKK (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik</b>				
	82	86	85	103

Selama tahun 2020 jumlah pemohon layanan publik secara tidak langsung yaitu melalui melalui call center sebanyak 10.371, live chat sejumlah 15.621, E-mail sejumlah 15.165, Portal ULT sejumlah 22.354,

Portal LAPOR sejumlah 5.648, dan tatap muka daring sebanyak 1.059. sedangkan layanan publik secara langsung di Unit Layanan Terpadu sejumlah 4.902. semua pemohon layanan publik secara tidak langsung telah terlayani dengan persentase 100% dan yang telah diselesaikan adalah sejumlah 96,92%, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Kendala dalam pencapaian Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan public yaitu

- 1) Pemohon layanan publik secara langsung di Unit Layanan Terpadu tidak dilaksanakan selama bulan April s.d. Desember 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Semua pemohon layanan publik secara langsung telah terlayani dengan persentase 100%.
- 2) Petugas layanan tidak memberi kabar jika ada kegiatan kedinasan sebelum layanan zoom

Strategi dalam pencapaian Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan public diantaranya:

- 1) melakukan inovasi layanan dengan mengoptimalkan melalui portal Lapor, zoom, sms, email, dan telpon.
- 2) meningkatkan koordinasi dengan petugas dari unit utama melalui rapat dan komunikasi melalui alat komunikasi.



**Gambar 8. Petugas Layanan Terpadu secara Daring**

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik di capai melalui output layanan terpadu kemendikbud dari total alokasi anggaran sebesar Rp 4.322.691.000,- sampai akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 4.171.814.522,- atau 96,51%.

#### **4. Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Sasaran kegiatan Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut

##### **a. Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB**

Berdasar Perpres 29 th 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB didukung oleh output Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan dengan target ditahun 2020 adalah BB.

Berikut tingkat ketercapaian Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB.

**Tabel 9. IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target IKK 2020 (Predikat)</b>	<b>Target IKK 2024 (Predikat)</b>	<b>Capaian IKK (Predikat)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB</b>				
	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>BB</b>	<b>100</b>

Kendala dalam pencapaian Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB yaitu :

1. Belum adanya laman resmi Biro
2. Kurangnya pencatatan/notulen sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
3. Kurangnya pencatatan/notulen terhadap rapat monitoring perjanjian kinerja

Strategi dalam pencapaian Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB yaitu :

1. Melakukan notulensi pada rapat sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melakukan pencatatan/notulensi terhadap rapat capaian perjanjian kinerja

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB belum dilakukan penilaian. Pencapaian indikator kinerja ini di capai melalui output Layanan Dukungan Manajemen Satker dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3.171.839.000,- tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 2.970.440.390,- atau 93,65%.

**b. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86**

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 didukung oleh komponen Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan dengan target ditahun 2020 adalah 86.



### **Gambar 9. Total Nilai Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Berikut tingkat ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86.

**Tabel 10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target IKK 2020 (Nilai)</b>	<b>Target IKK 2024 (Nilai)</b>	<b>Capaian IKK (Nilai)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86</b>				
	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>98,54</b>	<b>114</b>

Kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 yaitu :

1. Adanya pandemi covid-19 mengubah rencana penarikan dana yang telah ditetapkan di awal
2. Adanya pandemi covid-19 membuat berkurangnya koordinasi secara tatap mukak langsung

Strategi yang dilakukan yaitu

1. Melakukan revisi rencana penarikan dana
2. Rapat dalam rangka koordinasi dilakukan secara daring

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 di capai melalui komponen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari total alokasi anggaran sebesar Rp 158.200.000,- sampai akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 151.440.000,- atau 95,73%.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Tahun 2020 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki pagu sebesar Rp 53.180.587.000,-. Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 51.914.714.960,- atau 97,62%. Alokasi anggaran ini

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan target 7 (Tujuh) output yaitu:

- 1) Layanan Terpadu Kemendikbud,
- 2) Beasiswa Darmasiswa RI,
- 3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal,
- 4) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi,
- 5) Layanan Kerjasama Internasional,
- 6) Layanan Dukungan Manajemen Satker,
- 7) Layanan Perkantoran.

Adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut:



**Gambar 10. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat per Desember 2020**

Dengan rincian realisasi anggaran per komponen sebagai berikut :

**Tabel 11. Rincian Realisasi Anggaran per Komponen**

Kode	Uraian	Total		
		Alokasi	Realisasi	%
626173	BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN	53.180.587.000	51.914.714.960	97,62

	MASYARAKAT			
01	SEKRETARIAT JENDERAL	53.180.587.000	51.914.714.960	97,62
01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	53.180.587.000	51.914.714.960	97,62
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	53.180.587.000	51.914.714.960	97,62
1987.001	Layanan Terpadu Kemendikbud	4.322.691.000	4.171.814.522	96,51
1987.001.001	Tanpa Sub Output	4.322.691.000	4.171.814.522	96,51
051	Pengelolaan Administrasi dan Operasional Layanan Terpadu	1.135.604.000	1.066.315.272	93,9
052	Koordinasi Layanan Terpadu	317.900.000	291.260.000	91,62
053	Pembekalan Petugas Layanan Terpadu	645.438.000	637.930.100	98,84
054	Penguatan Automasi Layanan Publik	53.262.000	52.150.000	97,91
055	Pengembangan Layanan Terpadu	1.440.780.000	1.414.612.750	98,18
060	Monitoring dan Evaluasi Layanan Terpadu	697.126.000	677.246.500	97,15
062	Pendampingan Pembentukan ULT di UPT	32.581.000	32.299.900	99,14
1987.002	Beasiswa Darmasiswa RI	184.513.000	154.795.190	83,89
1987.002.012	Tanpa Sub Output	184.513.000	154.795.190	83,89
051	Manajemen Layanan Program Beasiswa Darmasiswa RI	9.667.000	9.666.600	100
055	Beasiswa Darmasiswa RI	174.846.000	145.128.590	83
1987.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.236.072.000	1.223.007.370	98,94
1987.951.007	Tanpa Sub Output	1.236.072.000	1.223.007.370	98,94
051	Pengadaan kendaraan	83.128.000	76.800.000	92,39

	bermotor			
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.152.944.000	1.146.207.370	99,42
1987.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	27.230.990.000	27.051.665.294	99,34
1987.958.008	PUBLIKASI MELALUI MEDIA TV, RADIO, DAN CETAK	15.025.368.000	14.998.289.482	99,82
051	Publikasi Kebijakan Kemdikbud Melalui Penayangan Iklan Layanan Masyarakat	3.007.624.000	3.002.867.550	99,84
052	Talkshow Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui TV	1.904.335.000	1.903.605.000	99,96
053	Publikasi Hasil Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Penayangan Advertorial Media Online	4.333.515.000	4.313.284.197	99,53
054	Talkshow Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Radio	1.065.820.000	1.065.819.800	100
055	Liputan Khusus TV	54.000.000	54.000.000	100
056	Publikasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang	334.617.000	334.616.700	100
057	Sosialisasi Kebijakan Kemdikbud Melalui Penayangan Advertorial/Suplemen Kebijakan Pendidikan Di Media Cetak	3.210.118.000	3.210.033.585	100
058	Penyusunan Dan Produksi Publikasi Kebijakan Melalui Leaflet, Booklet, Kalender Meja, Dan Dinding	338.670.000	338.662.400	100
061	Penyusunan, Penerbitan Dan	776.669.000	775.400.250	99,84

	Pengiriman Majalah			
1987.958.011	PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL	2.230.608.000	2.228.348.066	99,9
051	Penyusunan Strategi Pengelolaan Media Sosial	787.909.000	785.831.000	99,74
052	Promosi Media Sosial	104.000.000	104.000.000	100
053	Workshop Pengelolaan Media Sosial	37.757.000	37.756.866	100
054	Pengelolaan Media Sosial	44.475.000	44.460.000	99,97
056	Evaluasi Pengelolaan Media Sosial	20.450.000	20.294.200	99,24
058	Produksi Konten Publikasi Melalui Media Sosial	1.236.017.000	1.236.006.000	100
1987.958.012	PUBLIKASI MELALUI MEDIA PORTAL KEMDIKBUD	378.470.000	377.459.200	99,73
051	Perencanaan Dan Pengembangan Portal Kemdikbud	8.680.000	8.680.000	100
052	Penyusunan Berita Portal Kemdikbud	173.268.000	172.907.200	99,79
054	Pengelolaan Portal Kemdikbud	60.800.000	60.150.000	98,93
055	Evaluasi Portal Kemdikbud	135.722.000	135.722.000	100
1987.958.013	LAYANAN INFORMASI PEMANGKU KEPENTINGAN	2.892.763.000	2.876.638.750	99,44
053	Kompilasi Karya Jurnalistik, Artikel, Surat Pembaca, Dan Advertorial Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan	438.199.000	436.299.000	99,57
057	Telaah Berita Dan Artikel Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan	4.000.000	4.000.000	100
058	Klarifikasi Berita Dan Aspirasi Masyarakat Pendidikan Dan Kebudayaan	232.898.000	228.380.000	98,06

059	Liputan	248.493.000	248.448.400	99,98
063	Survey Kepuasan Pelanggan/Stakeholders Satisfaction Survey (SSS)	1.534.539.000	1.525.406.750	99,4
064	Peran Serta Pameran Pendidikan Di Dalam Dan Luar Negeri	434.634.000	434.104.600	99,88
1987.958.015	LAYANAN PERPUSTAKAAN KEMDIKBUD	1.776.492.000	1.732.739.126	97,54
051	Promosi Perpustakaan	248.148.000	248.144.500	100
053	Pengembangan Koleksi Perpustakaan	723.926.000	694.047.826	95,87
054	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Kemendikbud	346.972.000	335.922.000	96,82
055	Pembinaan Perpustakaan Kemendikbud	457.446.000	454.624.800	99,38
1987.958.016	LAYANAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA	1.535.023.000	1.522.259.920	99,17
051	Penyusunan Materi Dan Pendokumentasian Hasil Rapat Kerja Pimpinan Kemendikbud Dengan Lembaga Tinggi Negara	720.421.000	719.756.400	99,91
052	Pendampingan Kunjungan Kerja Lembaga Tinggi Negara	189.604.000	189.276.660	99,83
053	Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud Pada Forum Bakohumas	131.655.000	131.449.925	99,84
054	Partisipasi Pada Konferensi, Seminar, Workshop Bidang Kehumasan Antar Lembaga Pemerintah (Kl/Non Kl)	26.622.000	21.388.485	80,34
055	Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud Dengan Pemerintah Dan Lembaga Daerah	466.721.000	460.388.450	98,64
1987.958.017	LAYANAN LEMBAGA	606.784.000	581.465.800	95,83

	MASYARAKAT			
051	Komunikasi Kebijakan Kemendikbud dengan Lembaga Masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	151.030.000	135.935.000	90,01
052	Pengembangan Jejaring Dengan Lembaga Masyarakat	275.452.000	271.819.500	98,68
053	Partisipasi Kemendikbud dalam Pemberdayaan Hubungan Dengan Lembaga Masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), Serta Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	54.448.000	53.965.700	99,11
054	Diskusi Panel Kebijakan Kemendikbud dengan Lembaga Masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerhati, Serta Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	55.496.000	55.000.000	99,11
055	Pengembangan Basis Data Lembaga Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan	17.580.000	14.797.000	84,17
056	Sarasehan Pembelajaran Terpadu Dengan Lembaga Masyarakat, Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerhati, Serta Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	52.778.000	49.948.600	94,64

1987.958.018	LAYANAN MEDIA	1.044.745.000	1.009.780.450	96,65
051	Diskusi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Pejabat Kemendikbud Dengan Media Massa	346.067.000	328.541.600	94,94
054	Jumpa Pers/Siaran Pers	136.484.000	135.280.200	99,12
055	Pendampingan Kunjungan Kerja Pejabat Kemdikbud Dengan Media Massa	382.420.000	367.954.650	96,22
056	Diskusi Kebijakan Dengan Media Massa Dan Workshop Kemendikbud Dengan Wartawan Daerah	179.774.000	178.004.000	99,02
1987.958.019	PENYEDIAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	883.354.000	873.147.000	98,84
051	Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	53.000.000	48.532.000	91,57
052	Uji Konsekuensi Informasi Yang Di Kecualikan	27.650.000	27.397.000	99,08
053	Koordinasi Konten Galery Kemendikbud	102.906.000	101.339.000	98,48
054	Pengelolaan Foto Publikasi Pendidikan dan Kebudayaan	22.002.000	20.516.300	93,25
055	Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat	511.276.000	511.218.700	99,99
056	Pengembangan Sistem Integrasi Bahan Layanan Informasi	166.520.000	164.144.000	98,57
1987.958.020	LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT	857.383.000	851.537.500	99,32
051	Apresiasi Foto Pendidikan Dan Kebudayaan	507.066.000	501.724.500	98,95
052	Apresiasi Artikel Dan Karya Jurnalistik Pendidikan Dan Kebudayaan	350.317.000	349.813.000	99,86

1987.964	Layanan Kerjasama Internasional	6.599.734.000	6.380.721.685	96,68
1987.964.012	Layanan Kerjasama Bilateral, Multilateral, Regional, Kunjungan Delegasi Asing ke Indonesia, dan UNESCO	5.756.680.000	5.600.428.955	97,29
051	Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	3.941.389.000	3.921.660.710	99,5
052	Layanan Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.407.090.000	1.285.708.600	91,37
053	Layanan Kunjungan Delegasi Asing ke Indonesia	17.043.000	4.735.000	27,78
054	Layanan Kesekretariatan KNIU	391.158.000	388.324.645	99,28
1987.964.024	Peningkatan Jaringan Kerjasama UNESCO	843.054.000	780.292.730	92,56
051	Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Terkait	481.640.000	423.973.730	88,03
053	Diseminasi dan Koordinasi Program ASPnet	361.414.000	356.319.000	98,59
1987.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.330.039.000	3.121.880.390	93,75
1987.970.001	tanpa sub output	3.330.039.000	3.121.880.390	93,75
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	305.123.000	303.957.000	99,62
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	158.200.000	151.440.000	95,73
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	299.095.000	298.497.400	99,8
054	Pengelolaan kepegawaian	728.683.000	689.289.590	94,59
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	1.420.537.000	1.320.535.400	92,96

056	Raker Informasi dan Humas	418.401.000	358.161.000	85,6
1987.994	Layanan Perkantoran	10.276.548.000	9.810.830.509	95,47
1987.994.001	Tanpa Sub Output	10.276.548.000	9.810.830.509	95,47
001	Gaji dan Tunjangan	6.457.738.000	6.335.552.730	98,11
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.818.810.000	3.475.277.779	91
	<b>T O T A L</b>	<b>53.180.587.000</b>	<b>51.914.714.960</b>	<b>97,62</b>

### C. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Biro kerja Sama dan hubungan masyarakat sebesar Rp. 3.719.258.000,- digunakan untuk memaksimalkan capaian indikator kinerja kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada umumnya, selama tahun 2020 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah mencapai target indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka Realisasi anggaran mengalami kendala sehingga tidak bisa maksimal, selain itu pandemi Covid-19 membuat indikator kinerja kegiatan tidak dapat terlaksana.

Dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah membuat langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh koordinator dan penanggung jawab kegiatan sehingga mencapai sasaran kinerja dan realisasi anggaran.

## **Lampiran I**

1. Kontrak kinerja Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
2. Capaian Kinerja Atase Pendidikan dan kebudayaan